

Pendidikan Multikultur



# A Mosaic of Culture



## BAB V Urgensi Pendidikan Multikultur

Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.



MINISTRY OF  
CULTURE AND TOURISM  
REPUBLIC OF INDONESIA  
[www.indonesiatourism.go.id](http://www.indonesiatourism.go.id)  
[www.my-indonesia.info](http://www.my-indonesia.info)



## **BAB 5**

# **Urgensi Pendidikan Multikultur**

### **A. Hakekat Pendidikan Multikultur**

Konsep pendidikan multikultur bukan merupakan hal yang baru dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya antropologi. Sejak lama negara-negara yang menjalankan demokrasi seperti Amerika Serikat dan Kanada sudah melaksanakannya, khususnya dalam usahanya untuk menghilangkan terjadinya diskriminasi rasial, antara kulit putih dan kulit hitam yang hasil akhirnya diharapkan dapat memajukan dan memelihara integritas nasional dalam demokrasi (Asyari, 2004). Di Indonesia, pendidikan multikultur relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat yang heterogen, terlebih pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru dilaksanakan sejak tahun 1999 di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan multikultur yang sedang dikembangkan di Indonesia tidak hanya relevan tetapi sangat sejalan dengan “pengembangan demokrasi dan kesadaran kesatuan dalam keberagaman” (Bhinneka Tunggal Ika). Pendidikan multikultur adalah pendidikan yang menghargai pluralisme budaya. Artinya, pluralisme budaya itu tidak hanya ditoleransi tetapi juga dirangkul. Hal ini bertujuan untuk memahami keragaman pengalaman manusia yang diharapkan dapat memberikan kearifan yang pada akhirnya tercapai kesejahteraan yang diidam-idamkan oleh semua masyarakat (Jannes, 2001). Implementasi pembelajaran IPS yang berwawasan multikultural, akan membantu siswa mengerti, menerima dan menghargai orang lain yang berbeda etnis, agama, budaya dan nilai kepribadian serta menjadikannya sebagai sebuah keniscayaan yang mesti disyukuri. Proses internalisasi kesadaran keberagaman melalui media pendidikan, akan menjadikan sekolah sebagai media strategis pelatihan dan pembiasaan siswa untuk senantiasa memahami keragaman adat, tradisi, nilai-nilai,

budaya dan bahasa masyarakat Indonesia yang multikultural, sehingga tumbuh kesadaran untuk hidup damai dan harmonis.

Secara oprasional, pendidikan multikultur pada dasarnya adalah program pendidikan yang menyediakan sumber belajar yang jamak bagi pebelajar (*multiple learning environments*) dan sesuai dengan kebutuhan akademik maupun sosial anak didik (Lasmawan, 2009: 111). Paradigma pendidikan multikultural dibangun atas asumsi: *pertama*, adanya kenyataan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam secara vertikal dan horizontal. Keberagaman ini bahkan telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. *Kedua*, kemajemukan pada satu sisi diakui dan disadari memberikan efek positif pada kehidupan berbangsa dan bernegara, namun disadari pula disisi lain sering kali berimplikasi negatif. *Ketiga*, terjadinya konflik akibat adanya perbedaan pemahaman akan keberagaman merupakan fenomena sosial yang sering muncul pada berbagai daerah yang ada di Indonesia. *Keempat*, proses militeristik dan kebijakan monokultural yang diterapkan pada pemerintahan Orde baru, telah mendegradasi kesadaran budaya etnis dan kearifan lokal masyarakat, *Kelima*, tujuan pendidikan multikultur adalah untuk menumbuhkan kesadaran kesatuan dalam keberagaman dan keberagaman dalam kesatuan, sehingga toleransi, tenggang rasa, empati, kesadaran hukum, keyakinan akan nilai-nilai kebaikan menjadi komitmen utama peserta didik, melalui proses-proses yang bersifat demokratis. *Keenam*, sampai saat ini diakui belum banyak praktek-praktek pendidikan dilakukan secara demokratis dengan memberikan kesempatan yang jamak bagi seluruh siswa untuk mengembangkan kebudayaan etnisnya.

## **B. Urgensi Pendidikan Multikultur**

Kebutuhan dan urgensi pendidikan multikultur sudah sejak lama dirasakan cukup mendesak bagi negara-negara majemuk seperti Indonesia. Kondisi ini tidak terlepas dari kenyataan bangsa Indonesia yang masyarakatnya sangat majemuk atau pluralis baik secara vertikal maupun horizontal. Secara horizontal kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, pakaian, makanan, dan budayanya. Secara vertikal

kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan, dan tingkat sosial budaya (Rahardjo, 2005) . Pada satu sisi, kemajemukan masyarakat memberikan dampak secara positif, namun pada sisi yang lain, kemajemukan juga menimbulkan dampak negatif, yaitu sering menimbulkan terjadinya konflik antar kelompok masyarakat. Kondisi ini diperkuat dengan adanya banyak studi yang menunjukkan salah satu penyebab utama dari konflik yang terjadi pada masyarakat Indonesia adalah akibat lemahnya pemahaman dan pemaknaan tentang konsep kearifan budaya (Tilaar, 2004; Asyumardi, 2002). Temuan ini dipertegas oleh Alqadrie (2005) Profesor Sosiologi pada Universitas Tanjungpura Pontianak yang mengemukakannya sebagai berikut:

Berbagai konflik sosial yang telah menimbulkan keterpurukan di negeri ini disebabkan oleh kurangnya kemauan untuk menerima dan menghargai perbedaan, ide dan pendapat orang lain, karya dan jerih payah orang lain, melindungi yang lemah dan tak berdaya, menyayangi sesama, kurangnya kesetiakawanan sosial, dan tumbuhnya sikap egois serta kurang perasaan atau kepekaan sosial.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rahman, (2005) bahwa konflik-konflik kedaerahan sering terjadi seiring dengan ketiadaan pemahaman akan keberagaman. Egoisme individual atau kelompok sering menjadi pemicu konflik yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan dan tindakan melanggar hukum lainnya.

Menurut Dantes Dkk, (2008) terdapat sejumlah rasional yang mendasari mengapa pendidikan *multikultur* itu sangat penting dikembangkan. Rasional utamanya adalah untuk menjadikan masyarakat terdidik memiliki jiwa, sikap, dan keterampilan diri dalam menyikapi perbedaan untuk menumbuhkan nasionalisme kebangsaan. Di sisi lain Mahfud (2010: 201) mengungkapkan pandangannya sebagai berikut:

Rasional pendidikan *multikultur* adalah: (1) menjadikan pembelajaran lebih menarik dan relevan dengan kehidupan rill siswa, (2) mengkondisikan siswa untuk terbiasa berbagi tentang budaya dan relasi sosialnya, (3) membelajarkan siswa tentang budaya diri, lingkungan, dan bangsanya, termasuk kehadiran berbagai ras dan etnis dalam lingkungan masyarakatnya, (4) meningkatkan keberterimaan siswa terhadap budaya bangsa lain, (5) menjadikan

pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna, dan (6) membudayakan nilai-nilai kebudayaan nasional pada diri siswa.

Melalui pengembangan pendidikan multikultur siswa akan mengenal dan menghargai perbedaan budaya, agama, ras, etnis, dan bahasa yang ada di lingkungannya secara arif dan bijaksana (Zamroni, 2011). Aktivitas pembelajaran yang dikembangkan oleh guru dalam kesehariannya logikanya dikemas untuk mampu menghadirkan konteks sosial riil dalam kelas, sehingga siswa akan dapat belajar bagaimana bertoleransi, berdiskusi, berdebat, dan memberikan penghargaan kepada siswa lainnya. Pola pembelajaran yang seperti ini belum banyak dikembangkan oleh guru saat ini. Itu berarti pula bahwa pendidikan multikultur baru sebatas wacana atau dokumen pembelajara guru yang belum teraktualisasikan dengan baik. Menurut Lasmawan (2009) proses pembelajaran multikultural dalam pembelajaran IPS, khususnya di SD baru pada tahap pengenalan pakain daerah, suku bangsa, tarian daerah, lambang daerah dan belum mampu menyentuh keterampilan hidup multikultur yang dijalani siswa dalam kehidupan nyata. Pernyataan ini diperkuat oleh temuan penelitian Dantes Dkk (2008) yang menyatakan pengintegrasian pendidikan multikultural pada SMP di Provinsi Bali belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dibisa dilihat berdasarkan hasil analisis silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS yang dibuat oleh guru. Demikian juga dengan pelaksanaan praktek pembelajaran dikelas, guru belum mampu mengintegrasikan domain-domain multikultural dalam proses pembelajaran dan proses evaluasinya. Proses evaluasi yang dilakukan masih terfokus pada pencapaian hasil pembelajaran tentang pengetahuan multikultural. Sementara evaluasi proses yang merupakan penilaian terhadap sikap dan pembiasaan berperilaku belum menjadi fokus perhatian guru.

Kesadaran akan urgensi pendidikan multikultural juga mengemuka pada masyarakat Indonesia semenjak terjadinya berbagai konflik kultural yang terjadi diberbagai daerah. Bukti kongkrit adanya upaya terstruktur yang dilakukan pemerintah dalam menumbuhkembangkan kesadaran dan pemahaman kultural masyarakat melalui praktek pendidikan adalah dengan tercantumnya secara tegas

proses pendidikan yang mesti dilaksanakan secara demokratis serta nilai keberagaman. Secara terinci dalam pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Berdasarkan ketentuan tersebut, tampak jelas upaya strategis yang mesti dilakukan oleh sekolah dalam menanamkan kesadaran multikultural pada setiap anak bangsa.

Sejatinya perlunya pendidikan multikultural pada masyarakat Indonesia didasarkan atas pertimbangan kondisi sosial kultural masyarakat Indonesia yang secara realistik merupakan masyarakat multikultural. Hal ini juga tidak terlepas dari potensi-potensi yang ada pada masyarakat itu sendiri, yang memungkinkan terjadinya multikulturalisme secara universal. Adapun beberapa pertimbangannya, yaitu : *Pertama*, pendidikan multikultural sebenarnya telah diterjedikan oleh para pendiri bangsa semenjak sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan bertumpah darah satu yaitu tanah air Indonesia, berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia, berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Sumpah pemuda ini mengisyaratkan adanya kesadaran kultural masyarakat Indonesia untuk bersatu padu dalam keberagaman yang ada. Etnis, ras, kepercayaan, budaya, bahasa, asal daerah tidak menjadi penghalang bagi berstunya masyarakat Indonesia dalam menentang dan melawan penjajahan yang membawa penindasan dan penderitaan. Konsep kesatuan dalam keberagaman ini kembali terlegitimasi dengan digunakannya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta bhinneka tunggal ika sebagai semboyan bangsa Indonesia. Saling membantu, menghargai perbedaan, toleran, empati, gotong royong, cinta damai, meyakini hukum karma merupakan pola hidup masyarakat Indonesia yang terkenal keberbagai belahan dunia. Namun proses kolonisasi fisik dan kolonisasi mental yang terus terjadi sampai saat ini telah mereduksi nilai-nilai multikultural yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa. *Kedua*, ditengah konflik kultural yang terus melanda bangsa Indonesia, salah satu media strategis yang ditenggarai mampu meminimalisasi konflik kultural adalah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural

merupakan pendidikan yang bersifat demokratis, menghargai keberagaman ras, etnis, agama, budaya, bahasa, nilai-nilai dan keyakinan dengan tetap memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan sebagai nilai dasar yang mesti dibangun secara beradab. Proses pendidikan ini diyakini akan mengurangi terjadinya prasangka dan konflik kultural serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberagaman sebagai sebuah kekayaan dan anugrah yang mesti disyukuri dan dijaga. *Ketiga*, pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang bersifat universal dan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan, bukan berorientasi pada nilai ekonomis. Pendidikan multikultural mengembangkan keterampilan majemuk, yaitu keterampilan sosial, individual, moral, spiritual dan keterampilan jasmani sekaligus. Pengembangan multi intlegensi ini diyakini akan memberikan pilihan-pilihan yang beragam pada semua siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. *Keempat*, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural yang dapat menjadi laboratorium hidup praktek pendidikan multikultural pada lingkungan sekolah. Proses penyemaian kesadaran kultural yang dilakukan pada lingkungan keluarga dan dikembangkan pada praktek pendidikan di sekolah diharapkan dapat dipraktekkan oleh siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dapat menjadi virus yang positif bagi masyarakat lainnya. Sikap fanatisme dan chauvinisme berlebihan yang selama ini terpelihara dan terpatri pada sebagian masyarakat akan terkikis dan terelaborasi dalam kesadaran sosial untuk membangun masyarakat yang berbudaya dan beradab. Secara sederhana pendidikan multikultural dapat dikatakan sebagai respon terhadap kondisi realistik keberagaman masyarakat sekolah dengan nilai-nilainya yang selama ini belum terakomodasi secara maksimal dalam praktek pendidikan di dunia persekolahan.

### **C. Tujuan Pendidikan Multikultural**

Tujuan dari pendidikan multikultur menurut Rahardjo (2005: 249) pemahaman akan diri dan orang lain, sebagaimana dikemukakannya bahwa:

Tujuan pembelajaran multikultur adalah: (1) meningkatkan konsep dan pemahaman diri, (2) meningkatkan sensitivitas terhadap orang lain, dan masyarakat bangsa lainnya, (3) meningkatkan keberterimaan dan pemahaman

terhadap keberagaman, konflik sosial, kebudayaan nasional, budaya dunia, nilai diri, dan perilaku sosial standar, (4) meningkatkan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan analisis dan sintesis terhadap masalah yang timbul dari pluralitas masyarakat, (5) berpikir terbuka saat dihadapkan pada masalah, (6) meningkatkan pemahaman terhadap sejarah bangsa, keterampilan berpikir, dan sikap kebersamaan dalam perbedaan yang alamiah, dan (7) meningkatkan nasionalisme dan penghargaan terhadap bangsa lain.

Dengan demikian tujuan pendidikan multikultural adalah untuk meningkatkan sensitifitas sekolah dalam memperhatikan kebutuhan siswa yang beraneka ragam secara etnis, ras, agama, budaya, bahasa, jender, kondisi sosial ekonomi, menumbuhkembangkan sikap dan perilaku positif terhadap keberagaman kultural, memberikan kesempatan kepada siswa dalam mengambil keputusan dan tindakan berkenaan persoalan yang berkaitan dengan keberagaman masyarakatnya serta membantu peserta didik dalam membangun komunikasi dan interaksi lintas budaya yang pada akhirnya mampu membuat siswa merasa nyaman dengan keberagaman budaya masyarakatnya. Sementara Mahfud, (2010: 187) menyatakan tujuan pendidikan multikultur adalah untuk menyiapkan peserta didik untuk dapat melakukan aksi-aksi sosial dalam menyikapi konflik, sebagaimana dikemukakannya bahwa:

Tujuan dari pendidikan multikultur adalah menyiapkan peserta didik menjadi orang yang sensitif terhadap tantangan masyarakat yang pluralis, sehingga pada saat mereka terjun sebagai warga masyarakat secara riil telah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan aksi-aksi sosial dalam menyikapi konflik-konflik yang terjadi sebagai dampak dari pluralitas masyarakatnya.

Melalui pendidikan multikultur siswa diharapkan dapat memahami dan mengekspresikan nilai diri dan masyarakatnya di tengah-tengah keberagaman budaya yang ada. Hal ini dapat diterjadikan melalui pembiasaan berpikir dan bersikap serta melakukan tindakan sosial di tengah-tengah keberagaman budaya, agama, ras, etnis dan bahasa, melalui proses pembelajaran multikultur. Melalui pembelajaran multikultur siswa secara optimal dapat mengeksplorasi potensi diri dan masyarakatnya, sebagai laboratorium pembelajaran IPS, sehingga bisa menumbuhkan sikap empati, toleran, dan demokratis melalui berbagai bentuk



pembelajaran dan kegiatan sosial yang merangsang keterampilan berpikir kritis siswa.

Secara rasional Indonesia merupakan negara kesatuan dengan wilayah yang sangat luas. Terdapat ribuan pulau dan didiami oleh beragam suku bangsa/etnis dengan keaneka ragaman budaya yang sangat unik. Demikian juga dengan bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat sangat beragam, walaupun secara nasional menggunakan Bahasa Indonesia. Menurut Ahmadi dan Amri (2011) kondisi masyarakat plural, baik dari segi budaya, agama, ras atau status sosial memungkinkan terjadinya benturan budaya antar ras, etnik, agama dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Berkenan dengan itu, dipandang perlu memberikan porsi pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan, agar siswa memiliki kepekaan terhadap gejala-gejala dan permasalahan-permasalahan sosial yang berakar pada keberagaman etnis, ras, agama dan budaya. Keragaman etnis, ras, agama, bahasa, budaya, keadaan geografis, kondisi sosial ekonomi, politik, gender menjadikan pendidikan multikultural sebagai sesuatu yang urgen untuk diimplementasikan dalam praktek pendidikan.

Pendidikan multikulturalisme juga menjadi komitmen global sebagaimana direkomendasikan UNESCO pada bulan Oktober 1994 di Jenewa, sebagai berikut:

*Pertama*, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebinnekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan berkomunikasi, berbagi dan bekerjasama dengan yang lain. *Kedua*, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. *Ketiga*, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan. *Keempat*, pendidikan juga hendaknya meningkatkan pengembangan kedamaian dalam pikiran peserta didik, sehingga mereka mampu membangun secara kokoh kualitas toleransi, kesabaran dan kemampuan berbagai serta memelihara.

Komitmen dunia atas pengembangan pendidikan multikultural dalam praktek pendidikan menjadi momentum penting akan adanya kesadaran bersama atas nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan persaudaraan yang perlu dibangun secara universal tanpa membedakan etnis, ras, agama, budaya, kondisi sosial ekonomi, politik, budaya, bahasa dan lainnya. Telah disadari bahwa keberagaman

masyarakat yang ada di hampir semua belahan dunia merupakan sebuah tantangan yang tak jarang berimplikasi pada perbedaan pemahaman yang berujung pada konflik. Berkenaan dengan itu, pengembangan dan penyebarluasan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai keberagaman merupakan sesuatu yang urgen untuk dilakukan jika masyarakat dunia ingin membangun peradaban dunia yang lebih humanis dan beradab.

Multikulturalisme dalam konteks pendidikan mesti dilakukan dengan melakukan rekonstruksi terhadap perangkat pembelajaran, materi ajar, sumber belajar, media, kurikulum, model pembelajaran sampai dengan pola evaluasi yang sejalan dengan pemikiran pendidikan dalam kesederajatan dengan menyeimbangkan antara proses dengan hasil pembelajaran. Jika selama ini telah terpolakan praktek pembelajaran yang berorientasi pada “kepentingan guru” untuk menuntaskan materi dan mencapai tujuan kurikulum, maka saat ini perlu dipolakan pembelajaran yang berorientasi pada konstruksi siswa secara mandiri dengan bimbingan, mediasi, dan fasilitasi dari guru sebagai pengembang dan pelaksana kurikulum. Jika kondisi ini dapat diterjadikan, alhasil proses pendidikan multikultural mampu mencapai target sebagaimana yang diharapkan.

### **Daftar Pustaka**

- Arends, R. (1997). *Learning to teach*. Singapore: Mc Graw-Hill book Company.
- Asyar'i, L. (2004). *Membebaskan Diri dari Keterikatan Lokal*. Kompas, Tanggal 3 September 2004.
- Asyumardi, A. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- ....., (2002). *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alwasilah, C. (2008). *Filsafat Bahasa dan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ahmadi, K dan Amri, S. (2011). *Mengembangkan Pembelajaran IPS Terpadu*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Abdul Wahid (2000). *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Retika Aditama, 2004, hlm. 22.
- Banks, J. A. & Ambrose A. C. Jr. (1995). *Teaching Strategies for the Social Studies*. NY: Longman, Inc.

- ....., (2005). "Multicultural Education: Its Effects on Studies' Racial and Gender Role Attitude" In *Handbook of Research on Social Teaching and Learning*. New York.: MacMillan.
- BSNP. (2006). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: BSNP.
- Basedau, M., Strüver, G., Vüllers, J. & Wegenast, T. (2011). "Do Religious Factors Impact Armed Conflict? Empirical Evidence from Sub-Saharan Africa". *Terrorism and Political Violence*, 752–779.
- Brown, Michael et al. 1997. *Nationalism and Ethnic Conflict, An International Security Reader*. Cambridge: MIT Press.
- Bennett, C. & Spalding, E. (1992). "Teaching the Social Studies: Multiple Approaches for Multiple Perspectives". In *Theory and Research in Social Education*. XX:3(263-292).
- Byrnes, D. (1988). "Children and Prejudice". *Social Education*. 52 (267-271).
- Budimansyah, D. dan S. Syam (ed). (2006). *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan (Menyambut 70 Tahun Prof. Drs. H.A. Kosasih Djahiri)*. Bandung: Lab. PKn FPIPS UPI.
- Blum A. (2001). *Antirasisme, Multikulturalisme dan Komunitas Antar Ras, Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural, dalam Lerry May dan Shari Colins Chobanian, Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultural*, Terjemahan: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bruce, Steve. 2000. *Fundamentalisme. Pertautan Sikap Keberagaman dan Modernitas*. Jakarta, Erlangga.
- Capra, F. (2007). *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*. M Thoyibi (Penerjemah). Yogyakarta: Yayasan bentang Budaya.
- Coser, Lewis A., 1913-2003. (2001). *The functions of social conflict*. London: Routledge. ISBN 978-1-135-63908-2.
- Dantes, Dkk. (2008). *Pengembangan Perangkat Evaluasi Proses dan Hasil Belajar IPS dan PKn (Laporan Penelitian)* Singaraja: IKIP Negeri Singaraja.
- Deny, S. (2008). *Integritas dalam Proses Pembentukan Identitas Bangsa Untuk Menumbuhkan Budaya Kewarganegaraan (Kajian Naturalistik Terhadap Tokoh dan Mahasiswa Etnis Tionghoa di Kota Medan Mengenai Pembangunan Masyarakat Multikultural) (Disertasi)*. Bandung: UPI.
- Farisi, I, (2005). *Rekonstruksi Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan IPS-SD Berdasarkan Perspektif Konstruktivisme. (Disertasi)*: Bandung: UPI.
- Faturochman (2003). *Konflik: Ketidak-adilan dan Identitas*. Yogyakarta: PPSK UGM.
- Fox, J. & Sandler, S. (2005). "The Question of Religion and World Politics". *Terrorism and Political Violence* 17 (3), 293–303.
- Hasan, H. (1996). *Pendidikan Ilmu Sosial*. Jakarta: Depdikbud.
- ....., (2005). *Pembaharuan Pendidikan IPS di Era Otonomi Pendidikan. (Makalah)*. Disajikan dalam seminar sehari Fakultas PIPS IKIP Negeri Singaraja. Singaraja: FPIPS IKIP Negeri Singaraja.
- Jannes, E. (2001). *Konflik Antar Etnis, Ujian Bagi Budaya Lokal*. Kompas, 21 Maret 2001.

- Jackson, P. (1994). *Handbook of Research on Curriculum*. New York: McMillan Publishing Company.
- Jarolimiek, J. and Walter P. (1993). *Social Studies in Elementary Education (9th.Ed)*. New York: McMillan Publishing Company.
- Jacquin, Dominique. 1998. "Ethnic War and International Intervention" dalam *Journal of International Studies*. South Kingstown: Millenium.
- Joyce, B., & Weil, M. (2009). *Model of teaching*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Kertih, W. (1998). Implementasi Model Pembelajaran Klarifikasi Nilai di Sekolah Dasar. (Tesis). Bandung: IKIP Bandung.
- ....., W. (2005). Analisis Kurikulum IPS dan PPKn Sekolah Dasar. (Laporan Penelitian). Singaraja: Singaraja: Lembaga Penelitian IKIP Negeri Singaraja.
- Koentjaraningrat. 2007. *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Karen, Amstrong (2009). "The Case for God: What Religion Really Means" diterjemahkan menjadi *Masa Depan Tuhan : Sanggahan terhadap Fundmentalisme dan Ateisme*, Bandung: penerbit Mizan, thn.2009.hlm.19-20.
- Lasmawan, W. (2003, 2005). Pengembangan Model Pembelajaran IPS dengan Pendekatan Sosial Budaya (Studi Pengembangan Pembelajaran IPS pada Sekolah Dasar di Bali). (Laporan Penelitian). Singaraja: STKIP Singaraja.
- ....., (2002). Pengembangan Model Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar Dengan Model Sains-Teknologi-Masyarakat (STM). (Disertasi). Bandung: UPI.
- ....., (2010). *Menelisik Pendidikan IPS dalam Perspektif Kontekstual-Empirik*. Singaraja: Mediakom Indonesia Press Bali.
- ....., (2009). Mengembangkan Pembelajaran IPS Berbasis Sosial Budaya dengan Model Konstruktivis (Laporan Penelitian). Singaraja: Undiksa
- Lindberg, Jo-Eystein (2008). *Running on Faith? A Quantitative Analysis of the Effect of Religious Cleavages on the Intensity and Duration of Internal Conflicts*. Tesis. University of Oslo.
- Mahfud, C. (2010). *Pendidikan Multikultur*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Muchtar, S. (2008). *Strategi Pembelajaran Pendidikan IPS*. Bandung: Sekolah Pascasarjana UPI.
- Matulesy, Andik. (2013?). Menggalang Toleransi Guna Mereduksi Konflik Antar Umat Beragama. Diakses pada 15 April 2015 dari <http://andikmatulesy.untag-sby.ac.id/tulisan/karya-ilmiah/90-menggalangtoleransi-guna-mereduksi-konflik-antarumat-beragama>
- Muladi. (2002). *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center. 2002, hlm. 25.
- National Council for the Social Studies. (1994). *Conecting Science, Technology and Education of Citizen*. Washington D.C.: NCSS.
- ....., (2000). *National Standards for Social Studies Teachers*, Volume 1. Washington, DC: National Council for the Social Studies.

- ....., (2001). *Guidelines for Teaching About Science/Technology/Society in Social Studies: Education for Citizenship in the 21st Century*: <http://www.uow.edu.au/sts/ncss/pubs/00nvt.html>.
- Nagel, P. (2008). *Cooperative Learning And The Elementary Social Studies Classroom*. *Journal Education*, 128. 3 (Spring, 2008): 363-368.
- Rahardjo, T. (2005). *Menghargai Perbedaan Kultural: Mindfulness dalam Komunikasi Antar Etnis* (Editor: Mu'amma Ramadhan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rose, C. And Nicholl. (2003). *Accelerated Learning for the 21st Century*. Bandung: Nuansa.
- Revell, N. (2010). Religious education, conflict and diversity: an exploration of young children's perceptions of Islam. *Educational Studies*. Dorchester-on-Thames: May 2010. Vol. 36, Iss. 2; pg. 207.
- Rauf, Maswadi (2001). *Konsensus dan Konflik Politik*. Jakarta: DIKTI.
- R. Garaudy (1993). *Islam Fundamentalis dan Fundamentalis Lainnya*. Bandung: Pustaka.
- Savage, T. & Armstrong, D. (1996). *Effective Teaching in Elementary Social Studies*. Ohio: Prentice Hall.
- Suparno, P. (1996) *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius
- Suryadinata, L. (2002). "Indonesian State Policy toward Ethnic Chinese: From Assimilation to Multiculturalism?", dalam Simposium Internasional III Jurnal Antropologi Indonesia. Bali: Universitas Udayana
- Soemantri. (2001). *Menggagas pembaharuan pendidikan IPS*. Bandung: Rosdakarya.
- Sukadi. (2006). Pendidikan IPS sebagai Rekonstruksi Pengalaman Budaya Berbasis Ideologi Tri Hita Karana (Studi Etnografi tentang Pengaruh Masyarakat terhadap Program Pendidikan IPS pada SMU Negeri 1 Ubud, Bali). (Disertasi). Bandung: UPI.
- ....., (2010). Pengembangan Model Pembelajaran PKn Berbasis *Yadnya*. (Laporan Penelitian) Singaraja: Undiksha
- Suparlan, P. (2002). Masyarakat Majemuk dan Perawatannya. *Jurnal Antropologi Indonesia*, Nomor 63. Tahun XXIV, September – Desember, 2002.
- ....., (1999). Kemajemukan Amerika: Dari Monokulturalisme ke Multikulturalisme. *Jurnal Studi Amerika*. Volume 5.
- Sadulloh. (2003). *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bumi Siliwangi: Alfabeta
- Slavin, R. (2005). *Cooperative Learning: Theory, Research and Practice*. London: Allyn and Bacon.
- Setiadi, Elly M. (2011). Pengantar sosiologi: pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: teori, aplikasi dan pemecahannya. Kencana.
- Swellengrebel, L. (1960). *Bali, Some General Information. Dalam Bali: Studies in life, Thought and Ritual*. The Hague: W. Van Hoeve.
- Schment, J. R. (2002). *Encyclopedia of Communication and Information* (Volume 1). New York: McMilland Reference.

- Stoner, James A. F, at all (1952). *Management (edisi ke-6th ed., Annotated instructor's ed.* Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. ISBN 0-13-108747-9.
- Sukamdi, Abdul Haris dan Browslee, Patrick (2000) *Migrasi Buruh di Indonesia, Politik dan Praktis.* Yogyakarta: Population Studies Centre Gadjah Mada University.
- Tilaar, H. (2004). *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transpormasi Pendidikan Nasional.* Jakarta: Grassindo.
- Titib, M. (1995). Nilai-nilai Budaya Bali; Implementasinya dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. (Makalah). Denpasar: Universitas Udayana
- Toomey, T. (1999). *Communicating Across Culture.* New York: The Guilford Publications.
- Triyanto. (2007). *Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik.* Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Paul E & Don K. (2012). *Strategi dan Model Pembelajaran: Mengajarkan Konten dan Keterampilan Berpikir.* Jakarta: Indeks
- Poedjiadi, A. (2007). *Sains Teknologi Masyarakat: Model Pembelajaran Kontekstual Bermuatan Nilai.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
- Wirawan (2010). *Konflik dan Menejemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelitian.* Jakarta: Salemba Humatika.
- Winataputra, U. (2001). *Jati diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS).* (Disertasi). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Zamroni, (2011). *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural.* Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.
- Zainuddin. (2013). "Solusi Mencegah Konflik Antarumat Beragama". Diakses pada 15 April 2015 dari <http://zainuddin.lecturer.uinmalang.ac.id/2013/11/11/solusi-mencegahkonflik-antarumat-beragama/>